

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

B

K

P

S

D

M



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan sebagai bentuk hasil kinerja selama tahun 2019.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis pada Capaian kinerja tahun ke IV yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2016-2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami telah berusaha dengan maksimal dalam menyusun Laporan Kinerja ini dan masih jauh dari sempurna, dan kami sadari bahwa kinerja yang telah dicapai masih belum optimal dan memerlukan kerja keras untuk mewujudkan perbaikan kedepannya. Kritik dan saran kami harapkan agar menjadi masukan agar Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 bisa lebih baik lagi.

Kuala Tungkal, Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SDM DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



H.R. GATOT SUWARSO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631017 199003 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.5 Struktur Organisasi.....	5
1.6 Sumber Daya Organisasi.....	6
1.7 Sistematika Penyajian .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis dan Target Tahun 2019 .....	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Kinerja .....	21
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	42
3.3 Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi.....	43
3.4 Realisasi Anggaran .....	49
3.5 Analisis Program/ Kegiatan.....	50
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja.....	60

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian daerah berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian yang efektif dan efisien, agar mampu mendorong peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021.

Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menjawab, menerangkan kinerja serta tindakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Indikator Kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, indikator kinerja sasaran strategis ini merupakan indikator kinerja *Output* dan atau *Outcome* dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (*Input*), keluaran (*Output*), dan hasil (*Outcome*) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

### I.2 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 disusun berpedoman pada:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23).
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- x. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- y. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

### I.3 Maksud dan Tujuan

---

Laporan Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban dan komitmen sesuatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang berisikan tentang informasi keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan perjanjian kinerja, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019.
- b. Sebagai bahan acuan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan pada periode yang akan datang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.
- d. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

### I.4 Tugas Pokok dan Fungsi

---

Secara umum aparatur dapat diartikan sebagai alat “Negara” namun ada juga yang beranggapan bahwa aparatur diartikan sebagai “pegawai negeri” yang mengandung pengertian sebagaimana tertuang dalam Undang–undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pada Pasal I huruf a berbunyi: “PegawaiNegeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas Negara Lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi Kepegawaian dalam hal ini mengacu pada kepegawaian sebagai suatu system penyelenggaraan manajemen ASN, termasuk di dalamnya Aparatur Sipil Negara sebagai Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada (*Existing system*). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **I.5 Susunan Organisasi**

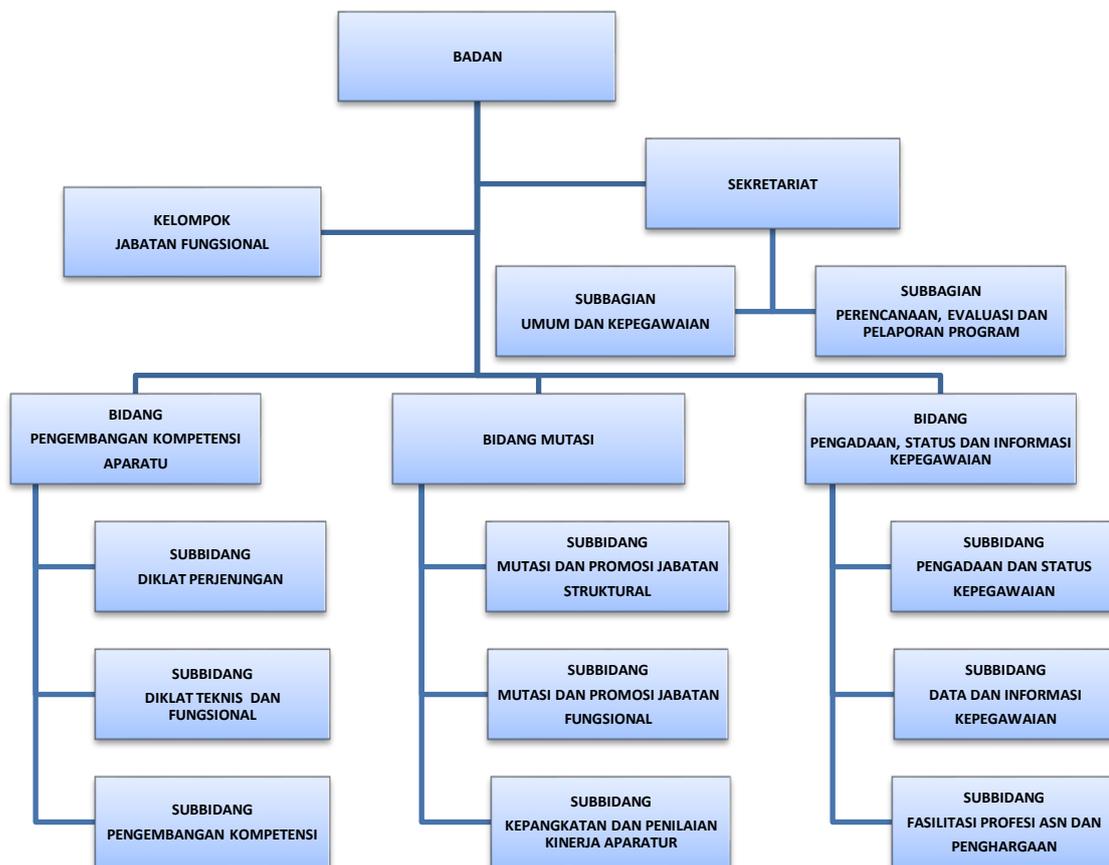
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah KabupatenTanjung Jabung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- b. Sekretariat membawahi :
  - 1) Sub. Bagian Umum dan Keuangan
  - 2) Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
- c. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
  - 1) Sub. Bidang Diklat Perjenjangan
  - 2) Sub. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
  - 3) Sub. Bidang Pengembangan Kompetensi
- d. Bidang Mutasi
  - 1) Sub. Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural
  - 2) Sub. Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan Fungsional

- 3) Sub. Bidang Kepangkatan dan Penilaian Kinerja Aparatur
- e. Bidang Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian
  - 1) Sub. Bidang Pengadaan Status Kepegawaian
  - 2) Sub. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian
  - 3) Sub. Bidang Fasilitasi Profesi ASN dan Penghargaan

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 lebih jelas sebagaimana berikut ini:

**Tabel I.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



## I.6 Sumber Daya Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat, personil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejumlah 67 Orang terdiri dari.

**TABEL 1.2**  
**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1.</b>	<b>Jumlah pegawai berdasarkan Eselon :</b>			
	- Eselon II	1	1	-
	- Eselon III	4	3	1
	- Eselon IV	11	6	5
<b>2.</b>	<b>Jumlah pegawai berdasarkan jumlah pendidikan :</b>			
	- S.3	-	-	-
	- S.2	1	1	-
	- S.1/DIV	26	19	7
	- D. III	1	-	1
	- SLTA	11	9	2
<b>3.</b>	<b>Jumlah pegawai berdasarkan status :</b>			
	- PNS	39	29	10
	- Non PNS	28	15	13
<b>4.</b>	<b>Jumlah pegawai mengikuti Diklat Perjenjangan :</b>			
	- Pim II	1	1	-
	- Pim III	2	2	-
	- Pim IV	1	1	-

Sumber : Data BKPSDM tahun 2019

Untuk kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dapat selesai tepat waktu serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Adapun fasilitasi yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tercatat sampai dengan Desember tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel I.3  
REKAPITULASI ASET  
TAHUN 2019

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	2	3
1.	Tanah	3,110,859,250
2.	Peralatan dan Mesin	7,853,614,855
3.	Gedung dan Bangunan	214,164,184
4.	Aset Tetap Lainnya	12,682,313,289
<b>TOTAL</b>		<b>23.860.951.578</b>

Sumber : Data BKPSDM tahun 2019

## I.7 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 dapat di ikhtisarkan sebagai berikut :

### BAB I

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### BAB II

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ Ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### BAB III

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis atas efisien penggunaan sumber daya;
5. Realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi;
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV

Penutup

LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Tahapan Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai pembaharuan, penataan dan perbaikan terhadap system kebijakan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan prilaku aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### **2.1. Rencana Strategis dan Target Tahun 2019**

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban bupati terkait dengan penetapan atau kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibuat pada masa jabatannya, Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tupoksi sebagai perangkat daerah yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitannya dengan Misi-4 RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni

## Misi-4

“Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui Harmonisasi Kehidupan Bearagama dan Berbudaya, Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintah yang baik”.

Visi adalah arah pandang kedepan tentang tujuan yang akan dicapai organisasi. Untuk mendukung capaian Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menetapkan visinya harus mengacu pada visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya, Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 yaitu :

## Visi

“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”

Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 adalah :

## Visi :

“ Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkompetensi dan Profesional“

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Perumusan misi mengacu pada tugas dan wewenang yang diberikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Untuk mewujudkan Visi tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan 4 (empat) *Misi* sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
MISI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Misi (M)
MI	<i>Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur</i>
M2	<i>Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik</i>

M3	Meningkatkan pembinaan disiplin dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur
M4	Meningkatkan pengembangan sumber daya aparatur dan mengelola sistem informasi kepegawaian

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka I (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Instansi pemerintah untuk jangka waktu jangka pendek (satu tahun) dalam rentang waktu masa Renstra. Adapun tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KAB. TANJAB BARAT

Kode	Tujuan (T)
T.1	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur.
T.2	Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang akuntabel dan produktif.
Kode	Sasaran (S)
S.1	Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi.
S.2	Peningkatan Penataan SDM Aparatur

Tabel 2.3  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-N					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12,4%	13,5%	15,5%	17,5%	19,2%	24,5%

2	Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang akuntabel dan produktif	Peningkatan Penataan SDM Aparatur	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	73%	76%	79%	79%	85%	85%
---	---	-----------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen yang berisikan penyusunan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan pernyataan perjanjian kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 terdiri dari 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja.

**Tabel 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompentensi	- Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	17,5 %
2.	Peningkatan Penataan SDM Aparatur	- Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	79 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Keuangan	- Skor IKM	79
		- Nilai AKIP	65
		- Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat /BPK	100%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.036.222.840	
2. Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	Rp. 377.980.000	
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 26.600.000	
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 76.780.000	
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 689.461.000	
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp. 1.195.937.000	

**Tabel 2.5**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**TAHUN 2016 s/d 2021**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompotensi	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal = 17,5%	Rekapitulasi Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	BKPSDM
2	Peningkatan Penataan SDM Aparatur	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi = 79%	Rekapitulasi Pejabat Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional tertentu	BKPSDM

CASCADING (POHON KINERJA)  
BKPSDM KAB. TANJAB BARAT

RPJMD



ESELON II



ESELON III



ESELON IV



Tabel 2.6  
 REVISI RENCANA AKSI  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	TARGET/ REALISASI								PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR (Output)	TARGET/ REALISASI							
					TW I		TW II		TW III		TW IV				TW I		TW II		TW III		TW IV	
1	PENINGKATAN SDM APARATUR YANG BERKUALITAS DAN BERKOMPETENSI	PERSENTASE ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	17,5	%	T	4	T	4	T	5,5	T	4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		T	-	T	10	T	10	T	9
					R	-	R	-	R	17	R	0,5			R	-	R	-	R	5	R	135
2	PENINGKATAN DAN PENATAAN SDM APARATUR	PERSENTASE APARATUR YANG MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI	79	%	T	-	T	25	T	27	T	27	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR		T	-	T	6	T	14	T	14
					R	-	R	1	R	64	R	14			R	-	R	6	R	-	R	27
												Uji Kompetensi Pejabat Administrator		T	-	T	-	T	110	T	-	
														R	-	R	-	R	85	R	-	
												Penyusunan Pola Karir PNS		T	-	T	-	T	410	T	413	
														R	-	R	-	R	-	R	1216	
												Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional		T	20	T	50	T	30	T	50	
														R	12	R	238	R	97	R	6	
												Penilaian Kinerja Aparatur		T	35	T	40	T	35	T	40	
														R	241	R	12	R	7	R	-	
												Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat		T	1	T	3	T	1	T	300	
														R	-	R	6	R	2	R	288	
												Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian		T	36	T	36	T	36	T	36	
														R	60	R	-	R	37	R	29	

						Penyusunan data dan informasi kepegawaian kabupaten tanjung jabung barat	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang mutakhir	T	-	T	-	T	-	T	42
								R	-	R	-	R	-	R	42
						Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan SAPK (Perka BKN No. 18 tahun 2010)	T	3	T	3	T	3	T	3
								R	3	R	3	R	3	R	3
						Fasilitas pengelolaan pembuatan KARIS/ KARSU/ KAPPEG/ Kartu ASN dan Penghargaan ASN	Terbitnya KARIS/ KARSU/ KAPPEG/ Kartu ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji	T	250	T	250	T	250	T	300
								R	162	R	419	R	110	R	84
						Seleksi Penerimaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Terlaksananya seleksi penerima beasiswa pendidikan tugas belajar bagi PNS dan Taruna sekolah tinggi perikanan serta sekolah tinggi	T	20	T	30	T	50	T	50
								R	-	R	26	R	-	R	126
						Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Sumpah PNS	Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pengambilan sumpah PNS Kab. Tanjung Barat	T	112	T	112	T	112	T	113
								R	-	R	-	R	138	R	185
						Pengadaan CPNS dan PPPK	Jumlah Formasi yang diusulkan	T	-	T	-	T	-	T	250
								R	-	R	-	R	-	R	250
						Kepangkatan	Terlaksananya kenaikan pangkat PNS periode April dan Oktober serta sistem kinerja	T	150	T	150	T	150	T	150
								R	328	R	151	R	86	R	126
						Peringatan HUT KORPRI Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan HUT KORPRI bagi PNS/ Anggota KORPRI	T	-	T	-	T	-	T	100
								R	-	R	-	R	-	R	100

**Tabel 2.7**  
**PAGU ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2019**

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>3,433,935,840</b>
	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>1,517,582,840</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,036,222,840</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,200,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64,800,000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	113,775,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	61,159,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	94,275,840
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39,670,000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8,791,000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	6,000,000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	637,552,000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>377,980,000</b>
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	140,900,000
12	Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor	56,000,000
13	Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	154,330,000
14	Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	26,750,000
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>26,600,000</b>
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	26,600,000
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>76,780,000</b>
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40,690,000
17	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	36,090,000
	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>1,916,353,000</b>
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>689,461,000</b>
18	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi	283,612,000

19	Diklat Prajabatan CPNS Golongan III	405,849,000
<b>6</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>1,195,937,000</b>
20	Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	299,350,000
21	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/KARSU/ KARPEG/ Kartu ASN dan Penghargaan ASN	24,400,000
22	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjung Barat	109,535,000
23	Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNS	22,700,000
24	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjung Barat	6,080,000
25	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	15,850,000
26	Seleksi Penerimaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kab. Tanjung Barat	159,732,000
27	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	62,125,000
28	Penilaian Kinerja Aparatur	62,245,000
29	Kepangkatan	125,300,000
30	Penyusunan Pola Karir ASN	11,395,000
31	Uji Kompetensi Pejabat Administrator	137,150,000
32	Pengadaan CPNS dan PPPK	121,975,000
33	Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian	38,100,000
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Motivasi Anggota KORPRI</b>	<b>30,955,000</b>
33	Peringatan HUT KORPS Pegawai Republik Indonesia	30,955,000

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanat di bidang pengelolaan SDM aparatur melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerjanya melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA tahun 2016-2021 maupun Renja tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

### 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dari sasaran strategis disusun berdasarkan isu-isu strategis yang menjadi permasalahan atau hal-hal yang perlu dilakukan peningkatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kewenangannya melaksanakan peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, dalam rangka pengukuran kinerja, indikator yang digunakan adalah Indikator sasaran strategis dan Indikator kegiatan. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah yang menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuan, target dan realisasinya. Dari perbandingan antara target dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja. Berikut ini disampaikan tingkat capaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019.

## 3.1.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019

NO	SASARAN KINERJA	IKU	TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	17,5%	19,2%	109,7%
2.	Peningkatan Penataan SDM Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	79%	80,4%	101,7%

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif, penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

### Tujuan I : Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur

#### SASARAN STRATEGIS I

#### Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkualitas dan Berkompetensi

Secara umum pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua yakni sumber daya manusia secara makro dan mikro, pengertian sumber daya manusia secara makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara. sedangkan pengertian sumber daya manusia mikro lebih mengerucut pada individu yang bekerja pada sebuah institusi. Sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (*capability*) atau keahlian (*expertise*) yang lebih dari sekedar keterampilan (*skill*) belaka, Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman atau pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi antara

faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan dan diklat. Untuk itu, dalam pencapaian sasaran strategis ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan analisis terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Indikator ini merupakan jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti Diklat Formal, dengan capaian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2  
Analisis Capaian IKU

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian s/d Tahun 2018	Realisasi Capaian s/d Tahun 2019		Jumlah
			Target	Realisasi	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>					
I	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	636 Org	29 Org	140 Org	776 Org
<b>Formulasi:</b> $\left[ \frac{\text{Jumlah Aparatur yang telah mengikuti diklat formal}}{\text{Jumlah Total Aparatur}} \right] \times 100$					$\frac{776}{4045} \times 100 = 19,2\%$

Sampai dengan tahun 2019 total aparatur yang mengikuti diklat formal sebanyak 776 orang atau bertambah 140 orang dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan Tahun 2019 ini sebanyak 4045 orang, sehingga persentase aparatur yang mengikuti diklat formal ditargetkan sebesar 17,5% dengan realisasinya pada tahun 2019 sebesar 19,2% atau mengalami kenaikan sebesar 1,7%.

**Tabel 3.3**  
**Aparatur mengikuti Diklat Fungsional**

N o	OPD / SKPD	N A M A / N I P	J A B A T A N	D I K L A T Y A N G D I I K U T I
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS DAERAH			
	BAGIAN HUMAS I DAN KEPROTOKOLAN	1 MITA ARIA SANTI, SE Nip. 19761004 201101 2 004	Pelaksana Analis Humas dan Protokol	Diklat Keprotokolan Di BPSDM Kemendagri Jakarta
2	SEKRETARIAT DPRD	2 MANSYURDIN, SHI Nip. 19780108 201001 1 004	Kasubbag Humas dan Protokol Setwa	Diklat Keprotokolan Di BPSDM Kemendagri Jakarta
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA )	3 ERVA ELISANTY Nip 19820325 200701 2 005	pengelola Kepegawaian	Diklat Teknis Inti Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dilingkungan Pemerintah Provinsi Kab/Kota Se Provinsi Jambi di BPSDM Prov Jambi
		4 ERVA ELISANTY Nip 19820325 200701 2 005	pengelola Kepegawaian	Diklat Teknis Inti Pengembangan Pariwisata Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Se Provinsi Jambi Di BPSDM Provinsi Jambi
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH ( BAPENDA )	5 AMILILIYANI, SAP Nip. 19860722 201903 2 001	Calon Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan	Diklat Keuangan Daerah Bidang Perpajakan Daerah Angkatan I 2019 di Sumatra Barat Universitas Andalas
		6 AHMAD FADHIL, SE Nip. 19951215 201903 1 002	Calon Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan	Diklat Keuangan Daerah Bidang Perpajakan Daerah Angkatan I 2019 di Sumatra Barat Universitas Andalas
		7 JOSUA KINGSLEY SITORUS, S.Pn Nip. 19940805 201903 1 002	Calon Pemeriksa Pajak Ahli Pertama	Diklat Keuangan Daerah Bidang Perpajakan Rakor Khusus Pemeriksa Pajak Daerah di Universitas Andalas Sumatra Barat
		8 RENTI LINA, S.Pn Nip. 19940713 201903 2 001	Calon Pemeriksa Pajak Ahli Pertama	Diklat Keuangan Daerah Bidang Perpajakan Rakor Khusus Pemeriksa Pajak Daerah di Universitas Andalas Sumatra Barat
		9 MUHAMMAD RIDWAN, SE Nip. 19950814 201903 1 001	Calon Pemeriksa Pajak Ahli Pertama	Diklat Keuangan Daerah bidang Perpajakan Kelas Khusus Penagih Pajak Daerah
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	10 I S M A I L, S.Pd.I Nip. 19790508 200604 1 016	Kasubbid Data dan Informasi kepegawaian	Diklat Analisis Kebutuhan Sistim Informasi ( Aksi ) 2019 Di BPSDM Provinsi Jambi
		11 PRAYUDHI, SE Nip. 19850616 201903 1 002	Calon Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	Diklat Aparatur Pelopor Revolusi Mental ( APRM ) bagi Jabatan Pelaksana Tahun 2019 Di Kemendagri Jakarta
		12 KARTIKA APRILIANA, S.Psi Nip. 19950409 201903 2 001	Calon Analis Kepegawaian Ahli Pertama	Diklat Analis Jabatan bagi ASN Tahun 2019 Di BPSDM Provinsi Jambi
		13 SAVANA RUSTIDARA, S.IP Nip. 19960716 201808 2 001	Analisis Tata Praja	Diklat Keprotokolan Di BPSDM Kemendagri Jakarta

		14	M. EFENDI, S.Sos.I NIP.19780327 200701 1 012	Kasubbid Pengembangan Kompetensi	Diklat Manajemen Kepemimpinan dan Kecerdasan Emosi Angkatan II dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi di BPSDM Provinsi Jambi Jl. H. Agus Salim No. 19 Kota Baru.
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ( BPKAD )	15	ZULHENDRA, S.STP Nip. 19791026 199810 1 001	Sekretaris BPKAD	Diklat Teknis Keuangan Daerah Angkatan III Tahun 2019 Bidang Non Perpajakan Daerah Kelas Khusus Penatausahaan Perbendaharaan Daerah di LPEM FEB UI Jakarta
7	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PRINDAG	16	SUSI LENANG WASEH, S.Si NIP.19921215 201903 2 001	Calon Penera Ahli Pertama	Diklat Penera Di Bandung
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	17	M. ENDRA Nip. 19810115 200701 1 013	Fungsional Umum	Diklat Manajemen Perpustakaan Angkatan VII
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	18	SION NAINGGOLAN, S. Pd NIP.196010151982031011	Pengawas SD	Diklat Desimenasi Pemetaan Mutu Pendidikan di LPMP Jambi
		19	NENG. AINI, S.Pd NIP. 19671022 200604 2 003	Guru Kelas SDN O60/V Mekar Jaya	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		20	SITI MISWATI, S.Pd. SD NIP. 19860821 201001 1 004	Guru Kelas SDN O60/V Mekar Jaya	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		21	MASHUDI, S.Pd SD NIP. 19790909 201101 1 004	Guru Kelas SDN 098/V Parit Pudin	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		22	KHAIRUL BASRI, S.Pd SD NIP. 19741106 200701 2 001	Kepala Sekolah SDN 189/V Kuala Indah	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		23	AUDITA LISTIANI, SPd NIP. 19850412 200904 2 004	Guru Mapel SMPN Seatap 3 Betara	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium di Hotel Ratu Jambi
		24	SISKA VERAWATI, S.Pd NIP. 19841010 200904 2 003	Guru Mapel SMPN Seatap 3 Betara	Diklat PKP Matematika di Kuala Tungkal
		25	ZULWASLI, S.Pd SD NIP. 19621225 198203 1 006	GurU Kelas SDN 198/V Parit Tekat	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		26	SISKA VERAWATI, S.Pd NIP. 19841010 200904 2 003	Guru Mapel SMPN Seatap 3 Betara	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		27	YULIANA SUSIYANTI, S.Pd NIP.19710716 200604 2 006	Kepala Sekolah SMPN 6 Merlung	Diklat Pembekalan Guru Inti Program PKP Mapel IPA SMP Region Sumatra di Garuda Plaza Hotel Medan

		28	HERI KISWANTO, S.Pd NIP. 19860420 201101 1 003	Guru Kelas SMPN 6 Merlung	Diklat Pembekalan Guru Inti Program PKP Mapel Matematika SMP di The Alts Hotel Palembang
		29	MARSINA TAMBA, S.Pd NIP. 19730824 200604 2 002	Guru Mapel SMPN 6 Merlung	Diklat PKP Mapel Bahasa Indonesia
		30	WIN ASTUTI, S.Pd NIP. 19821130 200904 2 004	Guru Mapel SMPN 6 Merlung	Diklat PKP Mapel IPA
		31	AGUSTINA, S.Pd.I NIP.19860801 201004 2 024	Guru Mapel SMPN 6 Merlung	Diklat PKP Mapel IPA
		32	EMA SUSANTI, S.Pd NIP.19800127 201001 2 014	Guru Mapel SMPN 6 Merlung	Diklat PKP Mapel Bahasa Inggris
		33	DESTI RAHAYU, S.Pd	Guru Mapel SMPN 6 Merlung	Diklat PKP Mapel IPA
		34	AMAT TAHIR, S.Pd.I	Guru Mapel SMPN 6 Merlung	Diklat PKP Mapel IPA
		35	SABAN NAINGGOLAN, S.Pd SD NIP. 19870403 201101 1 005	Guru Kelas SDN 072/V Kuala Tungkal	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		36	Hj. SURYANTI, S.Pd NIP.19650712 1986102 003	Guru Kelas SDN 072/V Kuala Tungkal	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		37	RAIHAH MARWIYAH, S.Pd.I NIP.19750810 200501 2 010	Guru PAI SDN 072/V Kuala Tungkal	Diklat Teknis Subtantif Guru PAI SD
		38	MERI ANDRIANI, S.Pd NIP. 19870303 201904 2 001	Guru Kelas SDN 200/V Pematang Lumut	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		39	ZAIMASTRI, S.pd NIP.19780329 201001 2 008	Guru Mapel SMPN 8 Tungkal Ulu	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		40	RIKA LUSYANA, S.Pd NIP.19870621 201101 2 010	Guru Mapel SMPN 8 Tungkal Ulu	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		41	LUQMAN, S.Pd NIP. 19650630 200701 1 022	Guru Mapel SMPN 2 Pengabuan	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		42	PATONI, S.Ag NIP.19721223 201212 1 002	Guru Mapel SMPN 2 Pengabuan	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium

		43	AHMAD BARKATI, S.Ag NIP.19750602 200604 1 004	Guru Mapel SMPN 2 Pengabuan	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		44	ARMADALIS, S.Pd NIP.19760515 201001 2 011	Guru Mapel SMPN 7 Merlung	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		45	ASWIN SAPUTRA, S.Pd NIP.19890309 201901 1 002	Guru Mapel SMPN 7 Merlung	Diklat dan Uji Coba Aplikasi Penyusunan RKAS DAN Pengelolaan Dana BOS
		46	EDRIANIS, S.Pd NIP.19880319 201502 2 001	Guru Mapel SMPN 10 Merlung	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		47	THUTY ARVONAILIS, S.Pd NIP.19721116 200604 2 009	Guru Mapel SMPN 10 Merlung	Diklat dan Uji Coba Aplikasi Penyusunan RKAS DAN Pengelolaan Dana BOS
		48	ILYAS, S.Pd NIP.19700408 199204 1 001	Kepala Sekolah SMPN 4 Seatap Pengabuan	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		49	ROHIM, S.Pd.I NIP.19730221 200701 1 001	Guru Kelas SDN 094/V Sungai Terab	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		50	BOHARI MUSLIM, S.Pd SD	Guru Kelas SDN 197/V Parit Lopon	Diklat Pengembangan Keprofesian berkelanjutan melalui Diklat Guru Kelas SD
		51	SAILANI, S.Pd NIP.19690630 200604 1 005	Guru Kelas SDN 084/V Makmur Jaya	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		52	BOHARI MUSLIM, S.Pd SD	Guru Kelas SDN 197/V Parit Lopon	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		53	TUTI HALIMAH, S.Pd.I NIP.19800426 200904 2 003	Guru Mapel SMPN 2Tungkal Ulu	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		54	DEWI SARTIKA HARYANTI, S.Pd NIP.19791220 200904 2. 002	Guru Mapel SMPN 2 Tungkal Ulu	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		55	NATALIA BR PALAWI, S.Pd NIP.19781212 200904 2 002	Guru Mapel SMPN 2 Tungkal Ulu	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		56	YUSNIATI, S.Pd NIP.19680608 200501 2 006	Guru Mapel SMPN 4 Tungkal Ulu	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		57	SEPTIMI HAYATI, S.Pd NIP.19750911 200604 2 009	Guru Mapel SMPN 4 Tungkal Ulu	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium

		58 NURJANAHA, SP NIP.19730121 200501 2 005	Guru Mapel SMPN 4 Tungkal Ulu	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		59 MISTU, S.Pd NIP.19651015 199007 1 001	Guru Mapel SMPN 4 Tungkal Ulu	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		60 ZAIHIEFNI, S.Pd.I NIP.19840624 201001 1 013	Guru Mapel SMPN 4 Tungkal Ulu	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		61 SYAIFUL BACTIAR NIP.19790605 201408 1 005	Guru Kelas SDN 158/V Lampisi	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		62 SITI AISYAH, S.Pd SD NIP.19861219 201101 2 006	Guru Kelas SDN 180/V Lampisi	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		63 SITI FITRIANI, S.Pd SD	Guru Kelas SDN 196/V Simpang Abadi	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		64 RTS. MAHNI, S.Ag	Guru Mapel SMPN Seatap I Tungkal Ilir	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		65 SANI, S.Pd NIP.19770620 200701 1 021	Guru Kelas SDN 095/V Bram Itam Kanan	Diklat Program Pengembangan Keprofisian Berkelanjutan Kelas SD ( Keatas )
		66 SANI, S.Pd NIP.19770620 200701 1 021	Guru Kelas SDN 095/V Bram Itam Kanan	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		67 M. HAPIZ, S.Pd SD	Guru Kelas SDN 010/V Senyerang	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		68 NUR SAADAH, S.Pd SD NIP.19731124 200501 2 004	Guru Kelas SDN 177/V Terjun Jaya	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		69 LENI HAMNI, S.Pd NIP.19791018 200904 2 002	Guru Mapel SMPN 5 Kuala Tungkal	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		70 NURFITRIA KRISNA WARDHANA Nst S.Pd NIP.19800120 200404 2 025	Guru Mapel SMPN 5 Kuala Tungkal	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		71 WIDIAN NOVITA, S.Pd NIP.19841009 200904 2 007	Guru Mapel SMPN 5 Kuala Tungkal	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		72 AMRINA. M, S.Pd NIP.19851225 200904 2 005	Guru Mapel SMPN 5 Kuala Tungkal	Pelatihan Sagusamed Non IT

		73 KUSNADI SASTRA, S.Pd NIP.19670209 199303 1 002	Guru Kelas SDN 193/V Dusun Mudo	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		74 ROSNAH, S.Pd SD NIP.19690310 200604 2 011	Guru Kelas SDN 130/V Bram Itam	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		75 HALIMAH, S.Pd NIP.19810805 200701 2 004	Guru Kelas SDN 188/V Pematang Lumut	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		76 ROSITA, S.Pd I NIP.19780212 200801 2 015	Guru PAI SDN 190/V Kuala Tungkal	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		77 HUSNUL ATIAH, S.Pd I NIP.19690504 200604 2 006	Guru PAI SDN 190/V Kuala Tungkal	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru PAI
		78 TAYTI, S.Pd NIP.19780916 201001 2 013	Guru Kelas SDN 190/V Kuala Tungkal	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		79 HENDRA BUDIMAN NIP.19850123 200904 1 002	Guru Mapel SMPN 3 Kuala Tungkal	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		80 HEMIA DEWI NIP.19800427 200904 2 005	Guru Mapel SMPN 3 Kuala Tungkal	Diklat PKP IPA
		81 HENDRA BUDIMAN NIP.19850123 200904 1 002	Guru Mapel SMPN 3 Kuala Tungkal	Diklat PKP Matematika
		82 IRIYANI NIP.19640525 198411 2 001	Guru Mapel SMPN 3 Kuala Tungkal	Diklat PKP Bahasa Indonesia
		83 SOFI MAULIDA NIP.19841207 200904 2 001	Guru Mapel SMPN 3 Kuala Tungkal	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		84 TUTY ALAWIYAH NIP.19840316 200904 2 003	Guru Mapel SMPN 3 Kuala Tungkal	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		85 SOFI MAULIDA NIP.19841207 200904 2 001	Guru Mapel SMPN 3 Kuala Tungkal	Diklat Satu GURU SATU media Edukatif Non IT
		86 EKA SUSANTI NIP.19670809 200501 2 007	Guru Mapel SMPN 3 Kuala Tungkal	Diklat Penulisan Karya Ilmiah
		87 TUTY ALAWIYAH NIP.19840316 200904 2 003	Guru Mapel SMPN 3 Kuala Tungkal	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal

		88 IRMA RAHMITA NIP.19850524 200904 2 004	Guru Mapel SMPN 3 Kuala Tungkal	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		89 TUTY ALAWIYAH NIP.19840316 200904 2 003	Guru Mapel SMPN 3 Kuala Tungkal	Diklat PKP BAHASA Inggris
		90 YULIA SASMITA NIP.19791215 200604 2 007	Guru Mapel SMPN 3 Kuala Tungkal	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		91 RESFA MULYA, S.Pd SD NIP.19710121 199502 2 001	Guru Kelas SDN 134/V Parit Arman	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		92 Drs. MUSLIHAH, M.Pd I NIP.19640327 200604 2 002	Kepala Sekolah SDN 028/V Bram Itam	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		93 MHD. JAMIL, S.Pd NIP.19750416 199811 1 001	Guru Kelas SDN 028/V Bram Itam	Diklat Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan
		94 Drs. MUSLIHAH, M.Pd I NIP.19640327 200604 2 002	Kepala Sekolah SDN 028/V Bram Itam	Diklat Supervisi Satuan Pendidik
		95 MHD. JAMIL, S.Pd NIP.19750416 199811 1 001	Guru Kelas SDN 028/V Bram Itam	Diklat Supervisi Satuan Pendidik
		96 MARKUS, S.Pd NIP.19750421 200501 1 004	Kepala Sekolah SMPN 3 Betara	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		97 WTYONO, S.Pd	Guru Mapel SMPN 3 Betara	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		98 NOFELINDA, S.Pd	Guru Mapel SMPN 3 Betara	Diklat PKP IPA
		99 CANDRA BUANA, S.Pd NIP.19691105 199303 1 004	Kepala Sekolah SMPN Seatap 6 Pengabuan	Diklat PKP Bahasa Indonesia
		100 ARIANTO, S.Pd NIP.19751023 200604 1 010	Kepala Sekolah SMPN I Pengabuan	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		101 SYAFRIDAL, S.Pd	Kepala Sekolah SMPN I Pengabuan	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		102 ARIANTO, S.Pd NIP.19751023 200604 1 010	Kepala Sekolah SMPN I Pengabuan	Diklat PKP Bahasa Indonesia

		103 DWITA OCVIYANTI, S.Pd	Guru Mapel SMPN I Pengabuan	Diklata PKP IPA
		104 INDRALMAN, S.Pd	Guru Mapel SMPN I Pengabuan	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		105 KASIMIN, S.Pd I NIP.19751111 200701 1 006	Guru Kelas SDN 168/V Rantau Badak	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		106 INDRALMAN, S.Pd	Guru Mapel SMPN I Pengabuan	Diklat PKP Matematika
		107 ASJUDETRA, S.Pd SD NIP.19851206 200904 1 002	Guru Kelas SDN 086/V Parit Pudin	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		108 ADAN TURAZI, S.Pd NIP.19670219 199204 1 001	Kepala Sekolah SDN 071/V Pematang Buluh	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		109 SADIKIN, S.Pd I	Guru SMPN Seatap 2 Betara	Diklat PKP BAHASA Inggris
		110 NAHARI, S.Pd SD NIP. 19670324 200604 1 004	Guru Kelas SDN 173/V Tanjung Benanak	Diklat Pembentukan Insrtuktur PKP Guru SD
		111 WELLI EKA SARI, S.Pd	Guru Kelas SDN 173/V Tanjung Benanak	Diklat Pembentukan Insrtuktur PKP Guru SD
		112 AHMAD MUKHSIN, S.Pd SD NIP.19691024 199811 1 001	Kepala Sekolah SDN 008/V Merlung	Diklat Supervisi Sekolah Model
		113 TRI JULISIANI, S.Pd SD NIP.19730703 199703 2 002	Guru Kelas SDN 008/V Merlung	Diklat Modul Pintar Tanoto Foundation
		114 JASMAWARDI, S.Pd I NIP.19830214 200904 1 001	Guru Agama SDN 008/V Merlung	Diklat SPMI
		115 TRI JULISIANI, S.Pd SD NIP.19730703 199703 2 002	Guru Kelas SDN 008/V Merlung	Diklat Modul 2 Tanoto Foundation
		116 SWINARMI, S.Pd NIP.19860103 201101 2 002	Guru Mapel SMPN 9 Tungkal Ulu	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		117 TRI JULISIANI, S.Pd SD NIP.19730703 199703 2 002	Guru Kelas SDN 008/V Merlung	Diklat PKP

		118 ROSMALLAH SARI, S.Pd NIP.19901228 201502 2 002	Guru Mapel SMPN 9 Tungkal Ulu	Diklat Kepala Perpustakaan dan Laboratorium
		119 FAUZAN NAJRI, S.Pd NIP. 19801229 200601 1 003	Kepala Sekolah SMPN 2 Kuala Tungkal	Pembinaan Sanggar Seni Budaya Oleh Disdikbudpar
		120 RISMAWATI, S.Pd. M.Si NIP.19700603 199401 2 002	Guru Mapel SMPN 2 Kuala Tungkal	Diklat Pengabdian pada Masyarakat Program Studi Biologi Mipa Jambi
		121 FAUZAN NAJRI, S.Pd NIP. 19801229 200601 1 003	Kepala Sekolah SMPN 2 Kuala Tungkal	Diklat Penyusunan dan Pengusulan Angka Kredit Poin Fungsional Guru di Kuala Tungkal
		122 DESMI, S.Pd NIP.19630420 199812 2 001	Guru Mapel SMPN 2 Kuala Tungkal	Diklat Pengabdian pada Masyarakat Program Studi Biologi Mipa Jambi
		123 FAUZAN NAJRI, S.Pd NIP. 19801229 200601 1 003	Kepala Sekolah SMPN 2 Kuala Tungkal	Diklat Calon Kepala Sekolah
		124 FENI SURYENTI, S.Pd	Guru Mapel SMPN 2 Kuala Tungkal	Diklat PKP Bahasa Indonesia
		125 FAUZAN NAJRI, S.Pd NIP. 19801229 200601 1 003	Kepala Sekolah SMPN 2 Kuala Tungkal	Diklat PKP Bahasa Inggris
		126 NURSEHAN, S.Pd	Kepala Sekolah SMPN 2 Kuala Tungkal	Diklat PKP Bahasa Indonesia
		127 FENI SURYENTI, S.Pd	Guru Mapel SMPN 2 Kuala Tungkal	Diklat Mendongeng
		128 MIA HANDAYANI, S.Pd	Guru Mapel SMPN 2 Kuala Tungkal	Diklat Sagusamed Non IT
		129 WIRDANINGSIH, S.Pd	Guru Mapel SMPN 2 Kuala Tungkal	Diklat Sagusamed Non IT
		130 MIA HANDAYANI, S.Pd	Guru Mapel SMPN 2 Kuala Tungkal	Diklat Pembekalan Instruktur PKP Bahasa Inggris di Jakarta
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	131 YELI YUNITA, SE Nip. 19830701 201001 2 015	Kasi Promosi Penanaman Modal	Diklat Promosi Penanaman Modal BKPM Cipanas Jawa Barat
11	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	132 ERWIN HARTONO Nip. 19810113 200604 1 008	Anggota Pemadam Kebakaran	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadan I di Pusdikloat Dinas Damkar Prov. DKI Jakarta

		133	ARBAINSYAH Nip. 19721112 200604 1 009	Pelaksana Pranata Pemadam Kebakaran	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I Di Rokan Hilir Riau
		134	SANDY AFRIZON Nip. 19610602 200604 1 001	Pelaksana Pranata Pemadam Kebakaran	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I Di Rokan Hilir Riau
		135	CIPTAYADI Nip. 19800721 200701 1 015	Pelaksana Pengelola Kepegawaian	Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I Di Rokan Hilir Riau
12	DINAS TENAGA KERJA	136	HENNY FADILLAH, S.AP Nip. 19760504 200801 2 006	Analisis Penempatan Tenaga Kerja	Diklat Pengantar Kerja Angkatan 58 dengan Metode Blended learning ( Campuran ) di Kementerian Tenaga Kerja Cipanas Jawa Barat
13	CAMAT SENYERANG	137	MUHAMMAD REZA PAHLEVI, SE.MM, Nip. 19730602 199903 1 004	Camat Senyerang	Diklat Peningkatan Kapasitas Camat
14	CAMAT BATANG ASAM	138	DIAN ISMAIL PARIPURNA, S.Sos, Nip. 19730505 199602 1 001	Camat Batang Asam	Diklat Peningkatan Kapasitas Camat
15	CAMAT PENGABUAN	139	HERMANSYAH, S.STP, MH Nip. 19820411 200112 1 001	Camat Pengabuan	Diklat Peningkatan Kapasitas Camat
16	CAMAT MUARA PAPALIK	140	Drs. RIDUWAN NIP.19740306 200012 1 001	Camat Muara Papalik	Diklat Peningkatan Kapasitas Camat

Sumber : data bid. Pengembangan BKPSDM tahun 2019

Dengan demikian, total pegawai yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan formal sampai dengan tahun 2019 sebanyak 776 orang dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

**TABEL 3.4**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021**  
**DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN KE-		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA
			REALISASI 2019	TARGET 2021	
1	2	3	4	5	6
I	Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	19.2	24.5	78.5

**Tujuan II : Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang Akuntabel dan Produktif.**

**SASARAN STRATEGIS II**

**Peningkatan Penataan SDM Aparatur**

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama dan terpenting dalam suatu organisasi dan pemerintahan, Pengelolaan SDM harus dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kemampuan SDM dengan kebutuhan Organisasi. keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara produktif.

Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme PNS sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah organisasi birokrasi. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian suatu kompetensi Aparatur Sipil Negara pada suatu jenis dan jenjang tertentu, Tujuan diselenggarakannya uji kompetensi yaitu:

*Pertama* untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara berupa pengetahuan, Keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan. sehingga Aparatur Sipil Negara tersebut dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien. *Kedua* yaitu memberikan pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian dalam rangka pembinaan dan Pengembangan karier Aparatur Sipil Negara, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan kelancaran penyelenggaraan tugas pembangunan, dibutuhkan sosok Aparatur Sipil Negara yang profesional.

Profesionalitas seorang Aparatur Sipil Negara yang ditampilkan melalui kemampuan melayani masyarakat dengan cepat dan berkualitas, akan menentukan hasil dari pembangunan yang dilaksanakan sehingga profesionalitas menjadi salah satu pertimbangan penting dalam rangkaian proses evaluasi dan penempatan Aparatur Sipil Negara. Peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme ASN dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga uji kompetensi dijadikan sebagai salah satu Indikator kinerja. Adapun analisis terhadap capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ke II adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Analisis Capaian IKU

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian s/d Tahun 2018	Realisasi Capaian s/d Tahun 2019		Jumlah
			Target	Realisasi	
I	2	3	4	5	6
<b>Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi</b>					
I	❖ Jumlah pejabat yang telah mengikuti Uji Kompetensi	96 Orang	110 Org	118 Org	214 Orang
	❖ Jumlah fungsional tertentu yang telah mengikuti Uji Kompetensi	2545 Org			2545 Orang
<b>TOTAL</b>					<b>2759 Orang</b>
<b>Formulasi:</b> $\frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu yang telah mengikuti uji kompetensi}}{\text{Jumlah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu yang ada}} \times 100$					$\frac{2759}{3431} \times 100 = 80,4\%$

Sampai dengan tahun 2019 total aparatur yang mengikuti uji kompetensi sebanyak 2759 orang atau bertambah 118 orang dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Struktural di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 3431 orang, sehingga persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi yang ditargetkan sebesar 79% dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 80,4% atau mengalami kenaikan 1,4%. Adapun pejabat struktural yang telah mengikuti uji kompetensi pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi

No	URAIAN	JUMLAH
I	2	3
<b>Jumlah pejabat yang telah mengikuti Uji Kompetensi</b>		
1.	Eselon II	33 Orang
2.	Eselon III	85 Orang
3.	Eselon IV	-
<b>Total</b>		<b>118 Orang</b>

Dengan demikian, jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti uji kompetensi pada tahun 2019 sebanyak 118 Orang dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

**TABEL 3.7**  
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021  
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN KE-		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA
			REALISASI 2019	TARGET 2021	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	%	80.4	85	94,6

### 3.1.2. INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG

**Tabel 3.8**  
Capaian Indikator Kinerja Pendukung BKPSDM  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019

No	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Rasio Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Skor IKM	79	83.4	105.5
2.	Nilai AKIP	65	-	-
3.	Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat / BPK	100%	100%	100%

#### A. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Untuk mencapai kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan survey kepuasan masyarakat, yang mana sasaran dari survey tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS yang ada di Lingkup Kab. Tanjung Jabung Barat dengan jumlah responden sebanyak 40 Orang sebagai sampel dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapaun terdapat 9 (Sembilan) item penilaian yang menjadi dasar dalam mengukur kepuasan responden terhadap penyelenggaraan pelayanan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Kesesuaian pelayanan dengan jenis pelayanan yang diberikan
2. Kemudahan dalam prosedur pelayanan

3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
4. Kewajaran biaya/ tariff dalam pelayanan
5. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
6. Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan
7. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
8. Kualitas sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan

Hasil dari survey ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan diklat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat dan juga dasar dalam rujukan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan agar pelaksanaan pelayanan menjadi lebih baik kedepannya.

Dari survey kepuasan masyarakat terhadap yang dilakukan terhadap 40 Orang responden, dari 9 (Sembilan) item pertanyaan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia, maka didapatkan nilai rata-rata kepuasan responden sebesar **83,38** dan masuk dalam kategori **BAIK**. Dimana standar mutu pelayanan sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Standar Mutu Pelayanan**

NO	NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
1.	25 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2.	65,00 – 76.60	C	KURANG BAIK
3.	76,61 – 88,30	B	BAIK
4.	88,31 – 100	A	SANGAT BAIK

Maka dari target IKM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2019 dengan target sebesar 79, diperoleh hasil dari survey Indek Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2019 dengan nilai 83, 38. Hasil tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hal ini tentunya menjadi cambuk bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar tidak berpuas diri dan terus melakukan perbaikan-perbaikan demi terwujudnya pelayanan yang maksimal untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat dan terwujudnya visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu : *Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkompetensi dan Profesional.*

## B. Nilai AKIP BKPSDM Tahun 2019

Nilai evaluasi AKIP pada tahun 2019 belum diketahui karena penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai Evaluator SAKIP dilaksanakan pada tahun 2020.

Adapun Target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang disusun dengan nilai 64 atau kategori “B” sedangkan Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 oleh Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh nilai **66,29** dengan kategori “B” Dengan pengertian AKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.10

Laporan Hasil Evaluasi Kinerja BKPSDM Tahun 2018

No	Dinas / Instansi	Komponen					Hasil Evaluasi	Kategori
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Pencapaian Kinerja		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	21,40	17,50	9,26	4,25	13,88	66,29	B

Sumber : Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2018

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, maka dari target kinerja yang dicanangkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Nilai 65 pada tahun 2018, dan hasil capaian realisasi yang diperoleh berdasarkan evaluasi Inspektorat dengan nilai 66,29, maka target kinerja yang dibuat sesuai dengan apa yang didapat. Dengan sesuainya realisasi dengan target yang ditetapkan maka capaian kinerja untuk indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah 100%

## C. Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat / BPK

Untuk perhitungan indikator “Persentase Penurunan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat/ BPK” adalah Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2019.

Pada tahun 2019 Realisasi kinerja Persentase Penurunan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat/ BPK diangka 100% dengan target kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%. dengan menetapkan target maksimal 100% menunjukkan komitmen SKPD untuk menjaga Akuntabilitas Kinerja & Keuangan yang telah dicapai tetap baik, sehingga dalam pelaporan hasil kinerja keuangan, hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2019.

Dari hasil tersebut didapatkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan inspektorat/ BPK, sehingga pada tahun 2019 ini, jumlah penurunan temuan bisa mencapai 100 %.

### 3.1.3 INDIKATOR KINERJA OUTCOME

Tabel. 3.II  
Capaian Indikator Kinerja Outcome BKPSDM  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019

NO	SASARAN KINERJA	IKU	TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural	40,9%	28,6%	69,9%
2.	Peningkatan Penataan SDM Aparatur	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN yang terselesaikan	90%	90%	100%

#### A. Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural

Diklat Struktural adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sekaligus untuk memberikan pengetahuan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan mengenai bidang tugas serta budaya organisasi. Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat PIM II, III, IV serta diklat prajabatan Gol II, III sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12  
Analisis Capaian Kinerja Outcome

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian s/d Tahun 2018	Realisasi Capaian s/d Tahun 2019		Jumlah
			Target	Realisasi	
I	2	3	4	5	6
<b>Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural</b>					
I	- Diklatpim II	9 Orang	-	-	9 Orang
.	- Diklatpim III	104 Orang	-	-	104 Orang
	- Diklatpim IV	169 Orang	-	-	169 Orang
	- Diklat Prajabatan Gol. II dan III	834 Orang	40 Org	40 Org	874 Orang
<b>TOTAL</b>					<b>1156 Orang</b>
<b>Formulasi:</b> $\left[ \frac{\text{Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Diklat Struktural}}{\text{Jumlah Total Aparatur}} \right] \times 100$					$\frac{1156}{4045} \times 100 = 28,6\%$

Sampai dengan tahun 2018 total apartur yang mengikuti diklat struktural adalah 1156 orang atau bertambah 40 orang dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah pegawai Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai unsur pembagi sebanyak 4045 orang, sehingga persentase aparatur yang mengikuti diklat struktural ditargetkan sebesar 40,9% dan realisasinya pada tahun 2019 sebesar 28,6, Sehingga pencapaian realisasi kinerja pada tahun ini belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

TABEL 3.13  
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021  
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN KE-		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA
			REALISASI 2019	TARGET 2021	
I	2	3	4	5	6
I	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural	%	48,9	28,6	58,5

## B. Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai yang terselesaikan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dengan mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka Badan Kepegawaian Daerah sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan pemerintahan yang baik melalui penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin.

**Tabel 3.14**  
**Analisis Capaian Indikator Outcome**

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian s/d Tahun 2019		Jumlah
		Target	Realisasi	
I	2	3	4	5
<b>Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai yang terselesaikan</b>				
I	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai yang terselesaikan	12 Kasus	11 Kasus	11 Kasus
<b>Formulasi :</b> $\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Aparatur yang terkait pelanggaran disiplin}} \times 100$				$\frac{11}{12} \times 100 = 90\%$

Dengan demikian capaian indikator persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai yang terselesaikan pada tahun 2019 sebesar 90%. Adapun kasus pelanggaran disiplin yang terselesaikan pada tahun ini didominasi oleh kasus perceraian sedangkan kasus yang bersifat indisipliner pada tahun ini cukup kecil, selain itu masih terdapat kasus indisipliner yang masih dalam tingkat proses penjatuhan disiplin sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

3.2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

TABEL 3.15  
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 S/D TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI TAHUN KE-							
		T	R	T	R	T	R	T	R
		2016		2017		2018		2019	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural					27.9	27.9	40.9	28.6
2	Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12.4	13.0	13.5	13.4	15.5	15.9	17.5	19.2
3	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan	90	90	90	90	90	90	90	90
4	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	73	70	76	71.7	79	77.7	79	80.4
5	Skor IKM			77	80,2	78	82,5	79	83,4
6	Nilai AKIP			60	60,1	64	66,2	65	-
7	Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat / BPK			100	100	100	100	100	100

3.3. PERBANDINGAN DATA KINERJA ANTARA REALISASI

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-						Unit Penanggung Jawab						
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016		2017		2018			2019		2020		2021	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	Peningkatan SDM aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural (%)	26,9	48,9	6.558.540,228		27,9	172.272,000	40,9	1.585.035,600	44,9	1.594.079,880	48,9	1.603.576,374		27,9	202.475,850	28,5		100%	118%	70%	0%	BKPSDM					
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	11,6	24,5	5.550.374,000	12,4	261.015,350	13,5	873.737,800	15,5	205.620,850	17,5	130.000,000	19,2	120.000,000	24,5	94.145,500	13,0	13,4	15,9	105%	36%	99%	39%	BKPSDM				
		Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional bagi Aparatur dan Fungsional Daerah Pola Kontribusi	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional (Orang)	51	40	742.513,854		10	172.272,000	10	180.885,600	10	189.929,880	10	199.426,374	18	83.175,000	89	50.850,000	140	890%	48%	1400%	28%	BKPSDM					
		Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV (Orang)	40	90	1.812.450,000		30	604.150,000	30	604.150,000	30	604.150,000	30	604.150,000										BKPSDM					
		Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat PIMPEMDAGRI (Orang)		120	2.400.000,000		40	800.000,000	40	800.000,000	40	800.000,000	40	800.000,000										BKPSDM					











Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh BKPSDM memberikan data nilai output per-unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan selain permasalahan dalam hal pembiayaan, permasalahan sarana dan prasarana secara kualitas juga menjadi kendala. Kurangnya jaringan internet yang stabil merupakan permasalahan utama yang mewarnai perjalanan BKPSDM tahun 2019.

### 3.4. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, pagu anggaran BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2019 sebesar Rp. 20,504,247,639,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 17.070.311.799,- dan Belanja Langsung Rp. 3.433.935.840,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 16,147,620,524,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 13.335.956.965,- dan Belanja Langsung Rp. 2.811.663.559,-

Data anggaran dan realisasi APBD BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat untuk periode 31 Desember 2019 tersaji sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
I	2	3	4	5	6
1	BELANJA DAERAH	20,504,247,639	16,147,620,524	4,356,627,115	78.75
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17,070,311,799	13,335,956,965	3,734,354,834	78.12
-	BELANJA PEGAWAI	17,070,311,799	13,335,956,965	3,734,354,834	78.12
3	BELANJA LANGSUNG	3,433,935,840	2,811,663,559	622,272,281	81.88
-	BELANJA PEGAWAI	624,000,000	606,350,000	17,650,000	97.17
-	BELANJA BARANG DAN JASA	2,718,035,840	2,116,629,909	601,405,931	77.87
-	BELANJA MODAL	91,900,000	88,683,650	3,216,350	96,50
4	SURPLUS/ (DEFISIT)	(20,504,247,639)	(16,147,620,524)	(4,356,627,115)	78.75

Tabel 3.17  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		
		Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	%	Fisik
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,036,222,840	30,18	1,003,107,034	96,80	100
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	377,980,000	11,01	347,440,025	91,92	100
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	26,600,000	0,77	23,450,000	88,16	100
4.	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	76,780,000	2,24	73,410,000	95,61	100
5.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,195,937,000	34,83	895,076,500	74,84	98,46
6.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	689,461,000	20,08	439,840,000	63,79	64,00
7.	Peningkatan Motivasi Anggota KORPRI	30,955,000	0,90	29,340,000	94,78	100
<b>Jumlah 2019</b>		<b>3,433,935,840</b>	<b>100</b>	<b>2,811,663,559</b>	<b>81,88</b>	<b>94,64</b>
<b>Jumlah 2018</b>		<b>3.881.330.050</b>	<b>100</b>	<b>3.342.430.721</b>	<b>86,12</b>	<b>96,70</b>

### 3.5. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN

Dalam mewujudkan sasaran BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019 mengelola 7 program dan 34 kegiatan yaitu:

#### 3.5.1. Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 Kegiatan antara lain:

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- ✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - ✓ Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
  - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - ✓ Penyediaan Makanan dan Minuman
  - ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4 Kegiatan antara lain:
- ✓ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 Kegiatan antara lain:
- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 Kegiatan antara lain:
- ✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kerja
  - ✓ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terdiri dari 14 Kegiatan antara lain:
- ✓ Seleksi Penerimaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  - ✓ Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
  - ✓ Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu
  - ✓ Penilaian Kinerja Aparatur
  - ✓ Kepangkatan
  - ✓ Penyusunan Pola Karir ASN
  - ✓ Uji Kompetensi Pejabat Administrator
  - ✓ Pengadaan CPNS dan PPPK
  - ✓ Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ Kartu ASN dan Penghargaan ASN
  - ✓ Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat
  - ✓ Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNSD
  - ✓ Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian

- ✓ Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- ✓ Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian
- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 Kegiatan antara lain:
  - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi
  - ✓ Pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan III
- g. Program Peningkatan Motivasi Anggota Korpri terdiri dari 1 Kegiatan antara lain:
  - ✓ Peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia

### 3.5.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari 10 Kegiatan, untuk mencapai tujuan tersebut dialokasi anggaran Rp. 1.036.222.840,- dengan tingkat realisasi keuangan Rp. 1.003.107.034,- (96,80%) dan rata-rata realisasi fisik 100 %. Adapun output yang dihasilkan meliputi penyediaan surat menyurat, listrik, air, alat tulis, dan barang cetakan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ✓ Penyediaan jasa surat menyurat alokasi anggaran Rp. 4.200.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.860.600,- (91,92%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi anggaran Rp. 64.800.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 55.724.884,- (86,00%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan alokasi anggaran Rp. 113.775.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 111.700.000,- (98,18%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran Rp. 61.159.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 53.478.200,- (87,44%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor alokasi anggaran Rp. 94.275.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 89.760.250,- (95,21%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan alokasi anggaran Rp. 39.670.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 32.555.000,- (82,06%) dan realisasi fisik 100%.

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor alokasi anggaran Rp. 8.791.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 8.746.950,- (99,50%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan alokasi anggaran Rp. 6.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 6.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Penyediaan Makanan dan Minuman alokasi anggaran Rp. 6.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 5.000.000,- (83,33%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah alokasi anggaran Rp. 637.552.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 636.281.150,- (99,80%) dan realisasi fisik 100%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan aparatur. Untuk mencapai tujuan tersebut anggaran yang dialokasikan Rp. 377.980.000,- dengan tingkat realisasi keuangan Rp. 347.440.025,- (91,92%) dan rata-rata realisasi fisik sebesar 100%. Adapun output yang dihasilkan antara lain tersedianya perlengkapan kantor, terpeliharanya gedung kantor dan terpeliharanya kendaraan dinas. kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ✓ Pengadaan peralatan gedung kantor alokasi anggaran Rp. 140.900.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 136.577.600,- (96,93%) dan realisasi fisik 100%
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor alokasi anggaran Rp. 56.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 50.000.000,- (89,29%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional alokasi anggaran Rp. 154.330.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 135.319.225,- (87,68%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor alokasi anggaran Rp. 26.750.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 25.543.200,- (95,49%) dan realisasi fisik 100%.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini secara umum dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapan aparatur sehingga terciptanya aparatur yang disiplin, untuk

mencapai tujuan tersebut anggaran yang dialokasikan Rp. 26.600.000,- dengan tingkat realisasi keuangan Rp. 23.450.000,- (88,16%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya alokasi anggaran Rp. 26.600.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 23.450.000,- (88,16%) dan realisasi fisik 100%.

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini secara umum bertujuan untuk melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk mencapai tujuan tersebut anggaran yang dialokasikan Rp. 76.780.000,- dengan tingkat realisasi keuangan Rp. 73.410.000,- (95,61%) dan realisasi fisik 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja alokasi anggaran Rp. 40.690.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 38.435.000,- (94,46%) dan realisasi fisik 100%.
- ✓ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun alokasi anggaran Rp. 36.090.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 34.975.000,- (96,91%) dan realisasi fisik 100%.

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan bagi aparatur Kab. Tanjung Jabung Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan Rp. 1.195.937.000,- dengan tingkat realisasi keuangan Rp. 895.076.500,- (74,84%) dan rata-rata realisasi fisik 98,46%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- ✓ Seleksi Penerimaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat alokasi anggaran Rp. 159.732.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 121.116.500,- (75,82%) dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan tersebut antara lain terlaksananya pembekalan pola pendidikan calon taruna sekolah tinggi transportasi darat sebanyak 66 Orang serta terlaksananya seleksi penerimaan taruna baru sekolah tinggi perikanan sebanyak 60 Orang.

- ✓ Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama alokasi anggaran Rp. 299.350.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 225.920.000,- (75,47%) dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan tersebut adalah terlaksananya pemetaan dan seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 33 Orang
- ✓ Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu alokasi anggaran Rp. 62.125.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 48.180.000,- (77,55%) dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan tersebut adalah jumlah PNS yang mengusulkan pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan, pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu sebanyak 353 Orang
- ✓ Penilaian Kinerja Aparatur alokasi anggaran Rp. 62.245.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 54.615.000,- (87,74%) dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan tersebut adalah pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural sebanyak 172 Orang serta terlaksananya mutasi PNS sebanyak 88 Orang
- ✓ Kegiatan Kepangkatan alokasi anggaran Rp. 125.300.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 79.300.000,- (63,29%) dan realisasi fisik 100 %, adapun output kegiatan tersebut adalah pelaksanaan kenaikan pangkat PNS periode April dan Oktober sebanyak 691 Orang
- ✓ Penyusunan Pola Karir ASN alokasi anggaran Rp. 11.395.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 10.725.000,- (94,12%) dan realisasi fisik 100% adapun output kegiatan tersebut adalah terlaksananya Penyusunan Pola Karir ASN sebanyak 1.216 Orang
- ✓ Uji Kompetensi Pejabat Administrator alokasi anggaran Rp. 137.150.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 97.410.000,- (71,02%) dan realisasi fisik 77%, adapun output kegiatan tersebut adalah terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Administrator sebanyak 85 Orang
- ✓ Pengadaan CPNS dan PPPK alokasi anggaran Rp. 121.975.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 51.525.000,- (42,24%) dan realisasi fisik 100% adapun output kegiatan tersebut adalah jumlah formasi yang diusulkan sebanyak 250 Formasi
- ✓ Fasilitasi pengelolaan KARIS/KARSU, KARPEG/ Kartu ASN dan Penghargaan ASN alokasi anggaran Rp. 24.400.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 24.380.000,- (99,92%) dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan tersebut

adalah Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ Kartu ASN dan Penghargaan ASN sebanyak 775 Izin

- ✓ Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjung Barat alokasi anggaran Rp. 109.535.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 100.210.000,- (91,49%) dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan tersebut adalah terselenggaranya pelaksanaan kegiatan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin sebanyak 8 kasus, dan tes narkoba sebanyak 288 Orang
- ✓ Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNSD alokasi anggaran Rp. 22.700.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 21.905.000,- (96,50%) dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan tersebut adalah jumlah PNSD yang diambil sumpah sebanyak 323 Orang
- ✓ Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian alokasi anggaran Rp. 6.080.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 5.940.000,- (97,70%) dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan tersebut adalah terciptanya data dan informasi kepegawaian sebanyak 42 buku.
- ✓ Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat alokasi anggaran Rp. 15.850.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 15.850.000,- (100%) dan realisasi fisik 100% adapun output kegiatan tersebut adalah terselenggaranya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara Online selama 12 Bulan
- ✓ Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian alokasi anggaran Rp. 38.100.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 38.000.000,- (99,74%) dan realisasi fisik 100% adapun output kegiatan tersebut adalah terlaksananya pelayanan izin perkawinan dan perceraian PNS sebanyak 11 kasus serta terlaksananya peningkatan pelayanan pensiun PNS sebanyak 115 Orang

f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Kab. Tanjung Jabung Barat, untuk mencapai tujuan tersebut anggaran yang dialokasikan Rp. 689.461.000,- dengan tingkat realisasi keuangan Rp. 439.840.000,- (63,79%) dan rata-rata realisasi fisik 64%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- ✓ Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS Golongan III alokasi anggaran Rp. 405.849.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 388.990.000,- (95,85%) dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan tersebut adalah Diklat prajabatan golongan III sebanyak 40 orang.
  - ✓ Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi aparatur daerah pola kontribusi alokasi anggaran Rp. 283.612.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 50.850.000,- (17,93%) dan realisasi fisik 28%, adapun output kegiatan tersebut adalah terlaksananya pengiriman peserta diklat struktural, teknis, fungsional dan bimtek sebanyak 5 orang.
- g. Program Peningkatan Motivasi Anggota Korpri
- Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan Solidaritas anggota KORPRI Kab. Tanjung Jabung Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan Rp. 30.955.000,- dengan tingkat realisasi keuangan Rp. 29.340.000,- (94,78%) dan realisasi fisik 100%. dengan output yang dihasilkan terlaksananya HUT KORPRI Kab. Tanjung Jabung Barat. kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
- ✓ Peringatan Korps Pegawai Republik Indonesia alokasi anggaran Rp. 30.955.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 29.340.000,- (94,78%) dan realisasi fisik 100%.

### 5.2.3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain:

- ✓ Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi aparatur daerah pola kontribusi, alokasi anggaran Rp. 283.612.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 50.850.000,- (17,93%) dan realisasi fisik 20 %. Kegiatan tersebut mengalami kendala dalam merealisasikan anggaran, hal ini disebabkan :
  - 1) Tidak diadakannya diklat PIM II, III dan IV di BPSDM Provinsi Jambi. Dimana kegiatan BPSDM Provinsi Jambi tahun 2019 menitik beratkan pada pelaksanaan Pendidikan Dasar CPNS Pola Kontribusi.
  - 2) BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat Barat Kesulitan dalam mencari calon peserta diklat teknis dan fungsional yang ditawarkan ke OPD.

- ✓ Seleksi Penerimaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat alokasi anggaranRp. 159.732.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 121.116.500,- (75,82%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan tersebut mengalami kendala dalam merealisasikan anggaran, hal ini disebabkan jadwal pelaksanaan pembekalan calon taruna STTD dilaksanakan pada bulan Ramadhan sehingga anggaran biaya makan minum tidak terealisasi sepenuhnya.
- ✓ Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama alokasi anggaranRp. 299.350.000,- dengan realisasi keuanganRp. 225.920.000,- (75,47%) dan realisasi fisik 97%. Kegiatan tersebut mengalami kendala dalam merealisasikan anggaran, hal ini disebabkanTim Panitia Seleksi (Pansel) pusat tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga dana yang dianggarkan tidak dapat terealisasi secara keseluruhan.
- ✓ Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu alokasi anggaranRp. 62.125.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 48.180.000,- (77,55%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan tersebut mengalami kendala dalam merealisasikan anggaran hal ini disebabkan kenaikan jabatan fungsional tidak harus dilakukan pelantikan sesuai dengan PP 11 Tahun 2017, Sehingga dana yang telah dianggarkan untuk pelaksanaan pelantikan seperti biaya makan minum, dokumentasi, cetak foto, dan dekorasi tidak dapat terealisasi sepenuhnya.
- ✓ Kegiatan Kepangkatan alokasi anggaran Rp. 125.300.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 79.300.000,- (63,29%) dan realisasi fisik 100 %. Kegiatan tersebut mengalami kendala dalam merealisasikan anggaran, hal ini disebabkanpelaksanaan penyerahan SK pangkat PNS tidak sesuai dengan target yang diharapkan sehingga anggaran biaya makan minum pelaksanaan penyerahan SK pangkat PNS tidak terealisasi secara maksimal.
- ✓ Uji Kompetensi Pejabat Administrator alokasi anggaranRp. 137.150.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 97.410.000,- (71,02%) dan realisasi fisik 77,00%. Kegiatan tersebut mengalami kendala dalam merealisasikan anggaran, hal ini disebabkanpeserta uji kompetensi administrator tidak memenuhi target jumlah peserta uji kompetensi sehingga dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan tidak terealisasi secara maksimal.
- ✓ Pengadaan CPNS dan PPPK alokasi anggaran Rp. 121.975.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 51.525.000,- (42,24%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan tersebut

mengalami kendala dalam merealisasikan anggaran, hal ini disebabkan jadwal pada pelaksanaan seleksi administrasi dan seleksi CAT yang rencana diadakan pada tahun 2019 terjadi perubahan jadwal dimana seleksi administrasi pada tahun 2019 dan seleksi CAT pada tahun 2020 sehingga anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan seleksi CAT tidak dapat terealisasi.

b. Solusi

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang maka dipandang perlu untuk :

- Melakukan koordinasi lebih intens dengan BPSDM Prov. Jambi serta melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga penyelenggara diklat yang ada di provinsi maupun pusat.
- Melakukan penyusunan kembali kegiatan pembekalan calon taruna STTD dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan.
- Melakukan koordinasi lebih intens dengan tim panitia seleksi (pansel) dalam penjadwalan seleksi.
- Penerapan PP No. II tahun 2017 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional.
- Melakukan pendataan kembali terhadap jumlah pejabat administrator yang akan melakukan Uji kompetensi

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019 ini merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 yaitu untuk tahun ke empat, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggung jawabkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 2 (Dua) sasaran yang di nilai berdasarkan 4 indikator kinerja, dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan diperoleh 3 Indikator yang dikategorikan berhasil.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut diatas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang, kita semua berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

### B. Strategi Peningkatan Kinerja

Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2019 dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diarahkan untuk memenuhi sumber daya aparatur yang profesional,
2. Melakukan pendataan kebutuhan diklat bagi apartur di lingkup Kab. Tanjung Jabung Barat,

3. Melakukan updating data/peremajaan data di SAPK secara berkala sebagai data dasar untuk melaksanakan pelayanan berbasis e-Government Kepegawaian,
4. Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi kepegawaian mulai dari pengadaan pegawai, penempatan, pengembangan karir, pemberian penghargaan dan hukuman, pemindahan hingga pensiun sehingga dapat dipertanggung jawabkan,
5. Mengoptimalkan koordinasi dan membangun hubungan kerjasama yang lebih baik dengan lembaga pelaksana kediklatan dan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi,
6. Meningkatkan motivasi kerja dan komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam renstra.